

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntansi bisa di artikan bagaikan suatu kesenian, pengetahuan(science) ataupun pe-rekayasaan (technology), tetapi pula bisa dimaksud bagaikan suatu cara. Cocok macam dimensi serta wujud badan konsumen data akuntansi, hingga aspek akuntansi bisa di klasifikasikan ke dalam 2 aspek penting, ialah: akuntansi zona eksklusif serta akuntansi zona khalayak. Akuntansi zona eksklusif merupakan sesuatu cara akuntansi buat menulis kegiatan ekonomi industri yang mengarah keuntungan(keuntungan oriented) ataupun sebutan yang lain merupakan industri swasta. Sebaliknya akuntansi zona khalayak tertuju untuk badan yang bertabiat nir keuntungan, semacam: Yayasan, LSM serta Penguasa.

Buat dapat lebih menguasai akuntansi sector public, hingga akuntansi hendaknya diamati bagaikan suatu cara (Abdul Halim, 2012), semacam arti oleh diserahkan oleh American Accounting Association 1966 selanjutnya :“ akuntansi merupakan sesuatu cara penjelasan, perhitungan, penulisan serta peliputan bisnis perekonomian (finansial) oleh sesuatu badan ataupun entitas dimana digunakan bagaikan data dalam bagan pengumpulan ketetapan perekonomian dari sekelompok yang membutuhkan”.

Maka begitu akuntansi zona khalayak bisa dengan deskripsikan bagaikan sesuatu cara pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan serta peliputan bisnis ekonomi(finansial) dari sesuatu badan ataupun entitas public semacam Penguasa, LSM, serta lain-lain yang dijadikan bagaikan data dalam bagan mengutip ketetapan ekonomi oleh stakeholders.

Semenjak diberlakukannya Hukum Nomor. 22 tahun 1999, mengenai penerapan independensi wilayah, hingga terjalin pergantian yang pokok dalam pengurusan finansial wilayah. Independensi wilayah merupakan wewenang yang dimiliki wilayah independensi buat menata serta mengurus masyarakatnya bagi kemauan sendiri bersumber pada harapan warga, cocok dengan peraturan UU yang legal.

Terpaut dengan pengurusan finansial wilayah, Penguasa dengan persetujuan DPR–RI sudah memutuskan satu paket hukum di aspek Finansial Negeri :

1. UU No. 17 tahun 2003 perihal Keuangan Negara
2. UU No. 1 tahun 2004 perihal Perbendaharaan Negara
3. UU No. 15 tahun 2004 perihal Pemeriksaan Pengelolaan juga Tanggungjawab Keuangan Negara.

Seluruh fitur Undang-Undang mulanya jadi awal untuk Negeri mengganti pola administrasi finansial (financial administration) jadi pengurusan finansial (financial management)

UU nomor. 17 tahun 2003 mengharuskan Kepala negara serta Gubernur atau Bupati atau Walikota buat mengantarkan Informasi Pertanggungjawaban penerapan APBN atau APBD berbentuk Informasi Finansial, yang mencakup :

1. Informasi implementasi APBN atau APBD
2. Neraca
3. Informasi jalan Kas
4. Memo tentang informasi finansial
5. Diikuti informasi finansial Negeri atau wilayah serta tubuh yang lain.
6. Disusun cocok Standar Akuntansi Rezim(SAP)

Buat menciptakan aturan mengurus yang bagus(good governance), Penguasa melaksanakan usaha tingkatkan kejernihan serta akuntabilitas pengurusan finansial Negeri.

Upaya pembaruan finansial Negeri melingkupi: Peraturan Perundang- Undangan, Kelembagaan, Sistem serta kenaikan mutu pangkal energi orang(SDM).

Peraturan Penguasa no 105 tahun 2000 mengenai pengurusan serta pertanggungjawaban finansial wilayah, menerangkan kalau pengurusan finansial wilayah wajib dicoba dengan cara teratur, patuh pada peraturan perundang- undangan yang legal, berdaya guna, efisien, tembus pandang, serta bertanggung jawab dengan mencermati dasar kesamarataan serta kepantasan. Keahlian Penguasa Wilayah(Pemda) dalam mengatur finansial bisa diamati dari Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah, yang memantulkan keahlian Pemda dalam membantu penerapan tugas- tugas penguasa, pembangunan, serta jasa pada warga.

Penguasa wilayah bagaikan pihak yang diberi wewenang melaksanakan aktivitas rezim, pembangunan, serta jasa pada warga mempunyai peranan buat mengantarkan informasi pertanggungjawaban finansial daerahnya dalam wujud informasi finansial yang disusun bersumber pada Statment Standar Akuntansi Rezim no 1 mengenai penyajian informasi finansial.

Informasi finansial disusun buat sediakan data yang relevan hal posisi finansial serta semua bisnis yang dicoba oleh sesuatu entitas peliputan sepanjang satu rentang waktu peliputan. Informasi finansial paling utama dipakai buat mengenali angka pangkal energi ekonomi yang digunakan buat melakukan aktivitas operasional rezim, memperhitungkan situasi finansial, menilai daya guna serta kemampuan sesuatu entitas peliputan serta menolong memastikan ketaatannya kepada peraturan perundang- undangan.

Tiap entitas peliputan memiliki peranan buat memberi tahu upaya- upaya yang sudah dicoba serta hasil yang dicapai dalam penerapan aktivitas dengan cara analitis serta tertata pada sesuatu rentang waktu peliputan buat kebutuhan:

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparansi
4. Penyeimbangan antara penerus
5. Penilaian kinerja.

ketetapan Penguasa pada usaha menciptakan informasi finansial Penguasa yang penuh prinsip akuntabilitas serta kejernihan, merupakan cara penerbitan ketetapan Penguasa (PP) No 24 tahun 2005, mengenai Standar Akuntansi Penguasa (SAP). SAP pada awal sedang memakai dasar kas perubahan belum berplatform akrual, sebab jadi era peralihan oleh single entry mengarah double entry. Bersumber pada PP 24 tahun 2005 itu, Penguasa Wilayah sedang diperkenankan buat memakai dasar kas perubahan sampai 5 tahun ke depan. Alhasil cocok mandat PP itu direalisasikan (PP) Nomor. 71 tahun 2010, mengenai SAP. Lewat SAP terkini itu Pemda dimulai tahun 2011 diharuskan memakai dasar akrual pada kategorisasi informasi finansial wilayah. Terdapatnya SAP jadi masa terkini untuk kemajuan akuntansi zona khalayak khususnya akuntansi penguasa di Indonesia.

Bedasarkan kasus itu, pengarang berupaya mempelajari gimana analisa perbandingan finansial pada biro pariwisata kota padang itu bagaikan pengimplikasian filosofi yang sudah diperoleh di perkuliahan yang dituangkan dalam suatu informasi magang.

1.2. Rumusan Masalah

1. Gimana Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Daya guna PAD?
2. Gimana Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Rasio Kemampuan Finansial Wilayah?

3. Gimana Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Keserasian?
4. Gimana Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Rasio Perkembangan?
5. Gimana Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Independensi Finansial Wilayah?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Daya guna PAD
2. Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Kemampuan Finansial Daerah
3. Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Keserasian
4. Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Pertumbuhan
5. Kemampuan Finansial Biro Pariwisata bila diamati dari Perbandingan Independensi Finansial Daerah



1.4. Manfaat Penulisan

1. Untuk Penulis
 - a. Bisa menaikkan pengetahuan serta bagaikan alat aplikasi teori- teori yang sudah didapat di kursi kuliah ke dalam permasalahan yang sebetulnya.

- b. Bisa mengenali mengenai metode metode, system, serta teknologi yang dipakai didalam bumi kerja.

2. Untuk Dinas Pariwisata Kota Padang

- a. Menolong aktivitas dalam penanganan kewajiban serta tanggungjawab Biro Pariwisata.
- b. Menjalakan ikatan bagus antara Biro Pariwisata dengan perguruan tinggi

1.5. Tempat dan Waktu

Tempat yang diseleksi sehabis dicocokkan dengan kerangka balik pula kesimpulan permasalahan yang hendak diulas ialah pada Biro Pariwisata kota padang, yang diseleksi tempat buat melaksanakan kuliah kegiatan alun- alun atau magang sepanjang 40 hari kegiatan.

1.6. Sistematika Penulisan Laporan

BAB I: Pendahuluan

Bermuatan Kerangka Balik yang melingkupi Kesimpulan Permasalahan, Tujuan serta pula Khasiat Magang dan Penataan Penyusunan Laporan Magang.

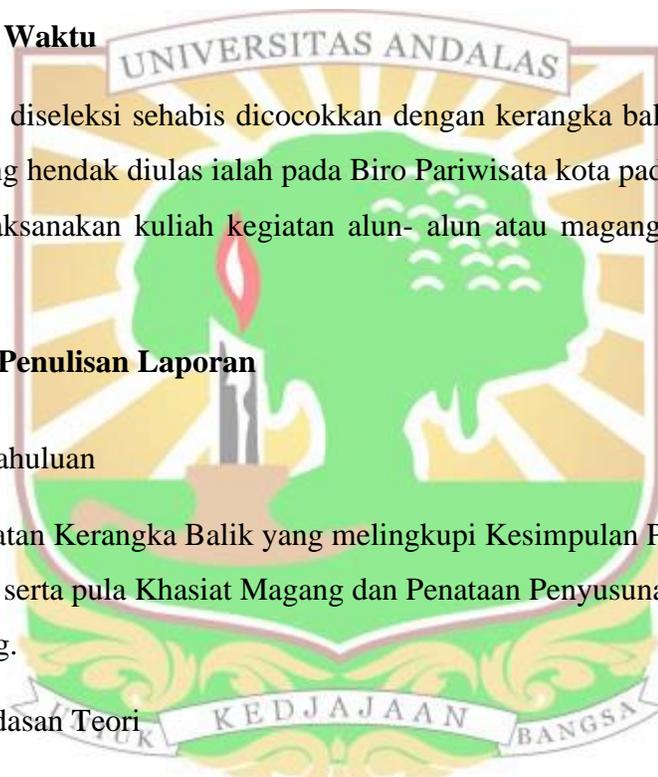
BAB II: Landasan Teori

di ayat yang merupakan kajian pustaka ataupun seluruh perihal yang hendak jadi alas filosofi dalam menuntaskan laporan magang.

BAB III: Gambaran Umum dan Profil Lembaga

Bermuatan cerminan biasa tubuh yang terdiri dari asal usul serta kemajuan tubuh, visi serta tujuan, logo serta bentuk organisasi tubuh.

BAB IV: Pembahasan



Berisikan output riset bidang sepanjang pada Biro Pariwisata kota padang dimana membahas mengenai analisa perbandingan finansial Dinas Pariwisata kota padang.

BAB V: Penutup

Kesimpulan dan anjuran dari penerapan magang yang dicoba pengarang.

